

**PENERAPAN AKUNTANSI ASET BERDASARKAN SAP NO.7 TAHUN 2010
UNTUK OPTIMALISASI ADMINISTRASI KELENGKAPAN ASET
PADA PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Aset Tetap di BPKAD Kota Sleman Yogyakarta)

Widya aldionita

(widyaldionita@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to answer whether the application of the accounting for these assets based on Governmental Accounting Standard No.7 of 2010 can help administrative optimization of the completeness of the asset itself.

In collecting the data, the technique used is interview and documentation. The type of data used are primary and secondary data while in analyzing the data, the technique used is a descriptive quantitative method, an analysis method on statistical data which then be interpreted in descriptive words.

The results of this study is that the report of the assets as recorded in Department of Financial and Regional Assets of Sleman Regency for the application of asset accounting based on Governmental Accounting Standard No. 7 of 2010 for the Administrative Optimization of the Completeness of Regional Government Assets is already appropriate, both in the disclosure and recognition of the assets themselves. However, on the fixed asset recognition at Department of Financial and Regional Assets of Sleman Regency, there are still unrecorded land assets due to the lack of evidence of ownership of the assets and the land assets that have not been reported, and this becomes an obstacle in carrying out records and reporting on land assets. Thus, making proof of ownership or completing the documents of the fixed assets that have not been reported can be done by reaffirming and re-checking hence the assets can be included in the proper records into reports of regional property, balance sheets, inventory items, and reports on reconciliation.

Keywords: *Fixed Assets Recognition, Fixed Asset Disclosures, Governmental Accounting Standard No.7 of 2010*

PENDAHULUAN

Di dalam perkembangan pemerintah untuk saat ini, aset sangat berpengaruh bagi pemerintah di dalam perkembangan operasional pemerintah itu sendiri. Menurut Widodo (2018), Kabid Aset BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Sleman, dalam Tribun Jogja.com, menyebutkan bahwa di BKAD itu sendiri masih terdapat permasalahan yang sebagian kecil aset Pemerintah Kabupaten Sleman belum tercatat dan untuk saat ini masih dilakukan pendataan kembali, tercatat pendataan dilakukan sejak Bulan Januari 2018. Ia juga mengatakan bahwa aset-aset tersebut merupakan sebagian dari hasil hibah. Ratusan petugas dikerahkan untuk melakukan pendataan sekaligus untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung-gedung milik pemerintah yang belum memiliki dokumen IMB.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akuntansi aset berdasarkan SAP No.7 Tahun 2010 untuk optimalisasi administrasi kelengkapan aset itu sendiri. Secara lebih jelas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah dengan adanya penerapan akuntansi aset ini yang berdasarkan SAP dapat membantu untuk optimalisasi administrasi kelengkapan aset itu sendiri. Maka, dengan ini, penelitian ini berjudul **“Penerapan Akuntansi Aset Berdasarkan SAP No. 7 Tahun 2010 Untuk Optimalisasi Administrasi Kelengkapan Aset Pemerintah Daerah” (Studi Aset Tetap di BKAD Kabupaten Sleman)**.

LANDASAN TEORI

Pengertian Aset dan Aset Tetap Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, aset dalam lampiran 1.08 adalah sebagai berikut.

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi yang diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, aset tetap (*fixed assets*) dalam lampiran 1.08 adalah “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum.” Aset tetap ini dapat berupa tanah, bangunan, area, dan sebagainya berupa fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah.

Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, klasifikasi aset tetap dalam lampiran 1.08 adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Gedung dan bangunan;
3. Peralatan dan mesin;
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi (sedang) dalam pengerjaan.

Cara Memperoleh Aset Tetap

Sedangkan menurut Rudianto (2012:259) dalam Sunanto (2017) “cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, dan diperoleh sebagai donasi.”

Pengakuan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tahun 2010, dalam lampiran 1.08, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai masa manfaat 12 bulan;
- b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 tahun 2010 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, aset tetap dalam lampiran 1.08. dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Suatu aset yang konstruksinya atau sebuah bangunan yang dibangun sendiri, maka di dalam pengukurannya dapat diandalkan atas perolehan dari transaksi pihak eksternal untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan konstruksi.

Penilaian Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 tahun 2010 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Aset tetap dalam lampiran 1.08. agar barang berwujud memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, maka awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi tanpa nilai Dengan ini, barang berwujud untuk dapat diakui sebagai aset harus diukur terlebih dahulu berdasarkan biaya perolehan, apabila ada suatu aset tidak memiliki nilai maka biaya aset tersebut harus didasarkan oleh nilai wajar saat perolehan aset tersebut.

Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 tahun 2010 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, aset tetap dalam lampiran

1.08., laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode; dan
3. informasi penyusutan.

Optimalisasi Aset Daerah

Siregar (2004:520) menyatakan bahwa studi optimalisasi aset pemerintah daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Identifikasi aset-aset pemerintah daerah yang ada;
2. Pengembangan data base aset pemerintah daerah,;
3. Studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik atas aset-aset pemerintah daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi; dan
4. Pengembangan strategi optimalisasi aset-aset milik pemerintah daerah.

Administrasi Aset Daerah

Menurut M.Yusuf (2013:27) secara fisik, aset yang dibeli perlu dikelola dengan baik. pemerintah membutuhkan perangkat administrasi yang memadai, bahkan harus serba otomatis, agar aset yang dibeli menjadi terjaga dan dapat dikendalikan

Penelitian Terdahulu

Sunanto (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Akuntansi Aset Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomer 07 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Di dalam penelitiannya, berdasarkan pengakuannya, aset sudah diakui sesuai SAP. Hanya saja, di dalam pengakuan aset tetap terdapat aset tetap tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan yang lengkap sehingga diharapkan agar aset tersebut dibuat hak kepemilikan atau bukti serah terima sebagai dasar bukti yang lengkap sehingga nantinya dapat dicantumkan kedalam neraca dan kedalam daftar barang milik daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Menurut Sugiyono (2014:193) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara :

- a. Jenis data primer
- b. Jenis data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sanusi (2014:105) berupa wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan, yang diantaranya:

- a. Wawancara.
- b. Dokumentasi

Analisis Data

Menurut Indrawan dan Yuniawati (2014:56) data deskriptif pada umumnya dikumpulkan berdasarkan melalui daftar pertanyaan dan survey, wawancara, ataupun observasi. Berdasarkan penelitian yang akan dikembangkan menggunakan analisis data yang bersifat :

- a. Deskriptif
- b. Kuantitatif

Penelitian ini, dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif merupakan metode penelitian yang menjelaskan fenomena mendalam dalam pengumpulan data. Di dalam penelitian, metode deskriptif merupakan model penelitian yang hanya mendeskripsikan dari hasil penelitian yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di dapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman telah mengacu pada dasar teori yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap yang merupakan acuan dalam penatausahaan aset, terutama aset tetap yang penatausahaan akuntansi telah berbasis akrual dan telah di atur atau kewajiban yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah. Adapun penjelasan dari penelitian ini dapat diuraikan dengan tabel sebagai alat perbandingan apakah sudah sesuai dengan akuntansi aset tetap yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah dengan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Bahwasanya telah dinyatakan oleh Ibu Fana dalam wawancara, ia menyatakan bahwa:

“oh... iya jelas sudah sesuai dengan SAP, itukan a... amanat ya..” dan “kalau amanatkan harus dilakukan sudah ada di Pemendagri sudah ada peraturan mentrinya kemudian diamanatkan ke seluruh daerah, dan itu sudah harus dilakukan, itu sejak penerapan SAP yang nomer peraturan nomer *tujuh, dua ribu sepuluh* sudah diperlakukan sejak tahun *dua ribu lima belas* kalau tidak salah, dua ribu lima belas seiring dengan peruntukan untuk penerapan akrual basis itu.”

Adapun tabel yang akan digunakan sebagai alat untuk perbandingan apakah aset tetap pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah, yang diantaranya :

Tabel 4.1
KERTAS KERJA PERBANDINGAN

No.	Uraian	pp. No.71 Tahun 2010 dalam PSAP. No.07 Tahun 2010 tentang aset tetap	Pemendagri. No. 19 tahun 2016 pedoman pengelolaan BMD	Praktek akuntansi aset tetap pada BKAD Kabupaten Sleman	Keterangan (sesuai / tidak sesuai)
1.	Pengakuan aset tetap (sesuatu transaksi aset tetap yang diakui dan dicatat)	Mempunyai masa manfaat 12 bulan	Pembukaan pada pasal 474 dan pasal 475	Berdasarkan Clak BKAD untuk aset diakui apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, pada prakteknya ada aset tetap tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan dan belum melaporkan.	Belum sesuai
		Biaya perolehan diukur dengan handal		aset tetap diakui dengan handal saat telah memiliki bukti kepemilikan yang lengkap (tercatat pada berita acara)	
		Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional pemerintah		Di BKAD aset tetap digunakan dan dioperasikan untuk keperluan operasional bukan untuk dijual belikan.	
		Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan		Aset tetap pada BKAD Sleman pada hakekatnya di bangun dan digunakan untuk operasional pemerintah.	
2.	Pengungkapan aset tetap	Laporan yang harus dilaporkan/ diungkapkan dari semua aset tetap	Pelaporan pada pasal 478	Dasar penilain yang digunakan untuk penentuan nilai dasar, nilai dasar tersebut merupakan	Sesuai

		atas dasar penilaian yang digunakan dan dicatat didalam laporan rekonsiliasi, neraca, dll.		informasi dalam melakkan pencatatan dan pelaporan aset tetap tersebut.	
--	--	--	--	--	--

Pengakuan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman bahwa, aset tetap dapat diakui aset tersebut peroleh atau diserahkan hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah, maka dari itu untuk pengakuannya dapat didukung dengan berita acara serah terima atau suatu dokumen sebagai penunjang bukti atas kepemilikan aset tersebut.

Adapun daftar asset tetap berdasarkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) periode 2017 yang dicatat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan, Jalan,Irigasi, dan Jaringan, aset Tetap lainnya, dan konstruksi dalam pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.2

Daftar Aset Tetap Tanah Dalam Kartu Inventaris Barang

No	Kode	Tahun	Nama Aset	Asal Usul Aset	Kriteria Aset	Harga	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Diolah oleh peneliti berdasarkan kartu inventaris barang

Tabel 4.3
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dalam Kartu Inventaris Barang

No	Kode	Tahun	Nama Aset	Asal Usul Aset	Kriteria Aset	Harga	Keterangan
1	2.3.1.1 .4	1992- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	38.150.000,00	Kijang
2	2.3.1.1 .4	1995- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	90.000.000,00	MITSUBHITS I
3	2.3.1.1 .4	1996- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	22.000.000,00	PICK UP
4	2.3.1.5 .1	1997- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	6.500.000,00	YAMAHA
5	2.3.1.5 .1	1998- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	3.500.000,00	Suzuki A 100
6	2.3.1.1 .3	1999- 12-31	Sepeda Wagon	Pembelian	Berwujud	46.500.000,00	Mitsubhitsu Colt T
7	2.3.1.5 .1	2002- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.550.000,00	Honda Supra
8	2.3.1.5 .1	2002- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.550000,00	Honda Supra
9	2.3.1.5 .1	2002- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.550000,00	HONDA
10	2.3.1.5 .1	2002- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.550.000,00	HONDA
11	2.3.1.1 .4	2003- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	104.000.000,00	MITSUBHITS I
12	2.3.1.5 .1	2003- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.825.000,00	Honda Supra Fit
13	2.3.1.5 .1	2004- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.825.000,00	Honda Kirana
14	2.3.1.5 .1	2004- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.825.000,00	HONDA

15	2.3.1.5 .1	2004- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	9.825.000,00	HONDA
16	2.3.1.5 .1	2007- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	10.610.000,00	Honda NF
17	2.3.1.1 .3	2008- 12-31	Staion Wagon	Pembelian	Berwujud	151.000.000,00	Toyota Rush
18	2.3.1.1 .4	2008- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	104.000.000,00	Isuzu Panther
19	2.3.1.1 .4	2008- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	163.000.000,00	Toyota Innova
20	2.3.1.5 .1	2008- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	12.350.000,00	Honda Revo
21	2.3.1.5 .1	2008- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	12.350.000,00	HONDA
22	2.3.1.5 .1	2010- 07-21	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	11.650.000,00	Suzuki New Shogun
23	2.3.1.1 .4	2010- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	149.996.000,00	Toyota avanza
24	2.3.1.5 .1	2010- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	11.850.000,00	SUZUKI
25	2.3.2.2 .1	2010- 12-31	Sepeda	Pembelian	Berwujud	3.370.000,00	/
26	2.3.1.1 .4	2012- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	98.000.000,00	Suzuki mega carn
27	2.3.1.1 .4	2012- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	148.000.000,00	AVANZA
28	2.3.1.5 .1	2012- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	13.750.000,00	SUZUKI
29	2.3.1.1 .3	2013- 12-31	Staion Wagon	Pembelian	Berwujud	148.400.000,00	TOYOTA
30	2.3.1.1 .4	2013- 12-31	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	Pembelian	Berwujud	154.500.000,00	TOYOTA

31	2.3.1.5 .1	2013- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	20.800.000,00	APPKTM
32	2.3.1.5 .1	2014- 12-19	Sepeda Motor	Pembelian APBD	Berwujud	14.732.500,00	Honda Supra X
33	2.3.1.5 .1	2014- 12-19	Sepeda Motor	Pembelian APBD	Berwujud	14.732.500,00	Honda Supra X
34	2.3.1.5 .1	2014- 12-19	Sepeda Motor	Pembelian APBD	Berwujud	14.732.500,00	Honda Supra X
35	2.3.1.5 .1	2014- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	14.119.000,00	Honda Supra X
36	2.3.1.5 .1	2014- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	14.119.000,00	Honda Supra X
37	2.3.1.5 .1	2014- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	14.119.000,00	Honda Supra X
38	2.3.1.5 .1	2014- 12-31	Sepeda Motor	Pembelian	Berwujud	14.119.000,00	Honda Supra X
39	2.3.1.1 .3	2015- 12-10	Staion Wagon	Pembelian APBD	Berwujud	335.270.000,00	Toyota New Avanza
40	2.3.1.5 .1	2015- 12-15	Sepeda Motor	Pembelian APBD	Berwujud	30.543.000,00	Honda Supra X
41	2.3.1.2 .3	2016- 07-15	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Pembelian	Berwujud	166.790.000,00	Toyota Grand New Avanza
42	2.3.1.5 .1	2017- 09-28	Sepeda Motor	Pembelian APBD	Berwujud	25.985.000,00	Yamaha/ N- Max
43	2.4.3.1 .31	2012- 12-31	Digital Multimeter	Pembelian	Berwujud	4.485.000,00	Garmin
44	2.4.3.1 .77	2012- 12-31	Alat Ukur Universal Lain-lain	Pembelian	Berwujud	37.200.000,00	Leica
45	2.4.3.1 .71	2015- 12-03	Global Positioning System	Pembelian APBD	Berwujud	39.500.000,00	GARMIN MONTERA
46	2.4.3.1 .31	2015- 12-14	Digital Multimeter	Pembelian APBD	Berwujud	3.740.000,00	QLDZ/ QLDZ01

47	2.4.3.1 .31	2015- 12-14	Digital Multimeter	Pembelian APBD	Berwujud	32.010.000,00	LEICA/ D510
48	2.4.3.1 .31	2015- 12-14	Digital Multimeter	Pembelian	Berwujud	10.670.000,00	Leica/D150
49	2.4.1.3 .5	2017- 09-19	Perkakas Bengkel Lain- lain	Pembelian APBD	Berwujud	5.665.000,00	/
50	2.4.2.5 .1	2017- 09-19	Tool kit Set	Pembelian APBD	Berwujud	2.508.000,00	/

Sumber: Data Diolah oleh peneliti berdasarkan kartu inventaris barang

Tabel 4.4

Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dalam Kartu Inventaris Barang

No	Kode	Tahun	Nama Aset	Asal Usul Aset	Kriteria Aset	Harga	Keterangan
1	3.11.1. 11.1	2003- 09-03	Bangunan gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	103.057.070.160,00	Stadion Maguoharjo; TKD
2	3.11.1. 1.1	2005- 08-10	Bangunan gedung kantor	Pembelian	Berwujud	6.085.748.700,00	GEDUNG DPKAD
3	3.11.1. 1.4	2009- 12-31	Bangunan gedung kantor	Pembelian	Berwujud	39.638.000,00	Sekat ruangan
4	3.11.1. 1.4	2012- 12-28	Bangunan gedung kantor	Pembelian	Berwujud	49.965.500,00	Tempat parker
5	3.11.1. 1.4	2012- 12-28	Bangunan gedung kantor	Pembelian	Berwujud	69.283.500,00	Ruang KepalaDinas
6	3.11.1. 11.1	2014- 01-27	Bangunana gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	8.522.735.000,00	GEDUNG GELANGGA NG PEMUDA
7	3.11.1. 1.4	2014- 12-31	Bangunan gedung kantor	Pembelian	Berwujud	30.800.800,00	Sekat ruang rapat

8	3.11.1. 11.1	2014- 12-31	Bangunan gedung olah raga	-	Berwujud	706.269.000,00	LAPANGAN TENES TRIDADI
9	3.11.1. 11.1	2014- 12-31	Bangunan gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	1.560.000.000,00	GOR PANGUKAN
10	3.11.1. 11.7	2014- 12-31	Bangunan gedung tempat	Pembelian	Berwujud	25.999.300,00	Pagar pembatas steril
11	3.11.1. 11.7	2014- 12-31	Bangunan gedung tempat	Pembelian	Berwujud	41.400.000,00	Ruling Tribun Kuning dan hijau
12	3.11.1. 11.7	2014- 12-31	Bangunan gedung tempat	Pembelian	Berwujud	191.184.818,00	Pagar stadion
13	3.11.1. 1.1	2015- 10-20	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	213.056.000,00	Penyempurnaan lapangan parkir stadion
14	3.11.1. 1.1	2015- 10-21	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	215.086.000,00	Pasangan lampu teribun stadion
15	3.11.1. 1.1	2015- 12-01	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	1.223.359.000,00	Penyempurnaan gor pemuda
16	3.11.1. 1.1	2015- 12-28	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	74.310.000,00	Pembuatan sumur dangkal masjid
17	3.11.1. 11.1	2015- 12-31	Bangunan gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	32.734.900,00	Pembuatan tempat sampah stadion
18	3.11.1. 11.1	2015- 12-31	Bangunan gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	49.852.000,00	Pembuatan papan reklame
19	3.11.1. 11.1	2015- 12-31	Bangunan gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	124.478.200,00	

20	3.11.1. 11.1	2015- 12-31	Bangunan gedung olah raga	Pembelian	Berwujud	176.550.000,00	Pemasangan pengamanan bangunan
21	3.11.1. 1.1	2016- 09-16	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	192.616.000,00	Pemasangan atap kanopi stadion
22	3.11.1. 1.4	2016- 11-30	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	20.863.700,00	
23	3.11.1. 11.7	2016- 11-30	Bangunan gedung tempat	Pembelian	Berwujud	25.267.000,00	
24	3.11.1. 11.1	2016- 12-09	Bangunan gedung olah raga	Pembelian APBD	Berwujud	72.398.150,00	
25	3.11.1. 14.1	2016- 12-21	Bangunan garasi/pool permanen	Pembelian APBD	Berwujud	7v0.500.000,00	Garasi DPKAD
26	3.11.1. 1.1	2016- 12-23	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	98.197.000,00	
27	3.11.1. 11.1	2016- 12-25	Bangunan gedung olah raga	Pembelian APBD	Berwujud	71.280.000,00	Penambah listrik stamag
28	3.11.1. 1.1	2017- 01-06	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	37.452.800,00	Pembuatan skat ruang lantai 1
29	3.11.1. 1.1	2017- 02-03	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	25.913.800,00	Pembuatan skat ruang printer
30	3.11.1. 1.1	2017- 05-24	Bangunan gedung kantor	Pembelian	Berwujud	39.705.600,00	Ruang arsip lantai 3
31	3.11.1. 11.1	2017- 07-03	Bangunan gedung olah raga	Pembelian APBD	Berwujud	68.970.000,00	Sarana olah raga (lantai kayu)
32	3.11.1. 11.1	2017- 07-24	Bangunan gedung olah raga	Pembelian APBD	Berwujud	78.590.000,00	Pagar dan sarana

							prasaran stadion
33	3.11.1. 2.1	2017- 11-14	Bangunan gudang tertutup	Pembelian APBD	Berwujud	128.315.000,00	Pembayaran pemeliharaan bangunan
34	3.11.1. 11.1	2017- 12-27	Bangunan gedung olah raga	Pembelian APBD	Berwujud	91.289.000,00	Teribun VIP stadion maguwoharjo
35	3.11.1. 1.1	2017- 12-28	Bangunan gedung kantor	Pembelian APBD	Berwujud	22.543.400,00	Pemasangan skat bidang akuntansi

Sumber: Data Diolah oleh peneliti berdasarkan kartu inventaris barang

Tabel 4.5

Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Kartu Inventaris Barang

No	Kode	Tahun	Nama Aset	Asal Usul Aset	Kriteria Aset	Harga	Keterangan
1	4.15.9. 1.3	2009-12- 30	Lain-lain	-	-	7.824.500,00	Pengaman listrik; kode tanah
2	4.15.9. 1.3	2012-12- 30	Lain-lain	-		1.950.000,00	Pengaman listrik; kode tanah
3	4.15.1. 5.4	2017-12- 22	Sumur Gali (SGL)	Pembelian APBD	Berwujud	19.865.000,00	Pemasangan urinor dan pembuatan sumur
4	4.16.3. 1.4	2010-12- 30	Jaringan telepon	-		23.650.000,00	Jaringan internet
5	4.16.1. 3.4	2016-12- 21	Jaringan cabang distribusi	Pembelian APBD		78.617.000,00	

Sumber: Data Diolah oleh peneliti berdasarkan kartu inventaris barang

Tabel 4.6
Daftar Aset Tetap Lainnya Dalam Kartu Inventaris Barang

No	Kode	Tahun	Nama Aset	Asal Usul Aset	Kriteria Aset	Harga	Keterangan
1	5.17.1.1.3	2012-12-31	Ilmu perpustakaan	Pembelian	Berwujud	125.000,00	Buku
2	5.17.1.1.3	2012-12-31	Ilmu perpustakaan	Pembelian	Berwujud	350.000,00	Buku
3	5.18.2.4.3	2015-05-05	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian	Berwujud	2.750.000,00	Jarring gawang
4	5.18.2.4.3	2015-12-30	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian	Berwujud	960.000,00	Net badminton yonex
5	5.18.2.4.3	2015-12-30	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian	Berwujud	3.100.000,00	Jarring gawang
6	5.18.2.4.3	2016-01-04	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian APBD	Berwujud	100.000,00	
7	5.18.2.4.3	2016-04-01	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian APBD	Berwujud	100.000,00	
8	5.18.2.4.3	2016-09-27	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian APBD	Berwujud	393.750,00	
9	5.18.2.4.3	2016-12-27	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian	Berwujud	11.066.000,00	
10	5.18.2.4.3	2016-12-30	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian APBD	Berwujud	7.480.00,00	
11	5.18.2.4.3	2017-09-08	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian APBD	Berwujud	475.000,00	
12	5.18.1.4.6	2017-09-18	Alat badminton	Pembelian APBD	Berwujud	4.900.000,00	Jarring lapangan dan net bulu tangkis
13	5.18.1.4.2	2017-09-25	Alat volley	Pembelian APBD	Berwujud	1.120.00,00	Net bola volley
14	5.18.2.4.3	2017-09-28	Alat olah raga dan lain-lain	Pembelian APBD	Berwujud	1.500.000,00	

15	5.18.1. 4.5	2017-12- 27	Alat sepak bola	Pembelian APBD	Berwujud	6.500.000,00	Jarring gawang sepak bola
----	----------------	----------------	-----------------	-------------------	----------	--------------	------------------------------

Sumber: Data Diolah oleh peneliti berdasarkan kartu inventaris barang

Berdasarkan dengan daftar aset tetap di atas bahwa aset tetap tanah ,bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi dan jaringan diperoleh melalui pembelian. Untuk aset tanah masih terdapat kendala karena belum tercatat pada daftar aset tetap, apabila aset tersebut belum terdaftar pada aset tetap yang dicatat didalam buku inventaris barang milik daerah maka dari itu aset tersebut juga belum tercatat didalam laporan neraca dan laporan barang milik daerah lainnya.

Pengungkapan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) periode 2017 yang dicatat oleh BKAD sleman hal- hal yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan yang diantaranya yaitu (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai yang tercatat (carrying), (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset yang diantaranya penambahan, pengurangan atau pelepasan, dan perubahan nilai jika ada, (3) Informasi penyusutan, yang meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat, tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, (4) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (5) kebijakan akuntansi untuk mengkapitalisasi aset tetap, (6) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dan konstruksinya, (7) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

PENUTUP**KESIMPULAN**

1. Klasifikasi aset tetap pada BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan PSAP. No.07 Tahun 2010.
2. Berdasarkan pengakuan aset pada BPKAD Kabupaten Sleman terdapat aset tetap tanah yang belum terdata karena kurang bukti kepemilikan dan adanya aset yang belum dilaporkan.
3. Pengungkapan aset tetap pada BKAD Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan PSAP. No. 07 tahun 2010.

SARAN

1. Peningkatan kompetensi SDM dalam mendalami mengenai PSAP agar terciptanya kinerja yang baik dalam pelatihannya.
2. Memberi pelatihan kepada para kinerja yang bukan dibagian akuntansi agar dapat lebih memahami terutama tentang aset tetap.
3. Memberi pelatihan kepada petugas yang bertugas pada bagian barang agar pencatatan dalam penatausahaan aset agar lengkap pendataannya.
4. Adanya ketegasan akan aset tetap yang saat ini belum terdata dan belum dilaporkan.
5. Berdasarkan pengakuan aset tetap perlu ditingkatkan kembali di dalam hal aset tetap yang belum terdapat bukti kepemilikan dan set yang belum dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, A. (2018). “BKAD Sleman Sebut Sebagian Aset Pemkab Sleman Sudah Terdata”. *Tribunjogja.com*. <http://jogja.tribunnews.com/2018/10/03/bkad-sleman-sebut-sebagian-besar-aset-pemkab-sleman-sudah-terdata>.
- Indrawan, & Yaniawati. P. (2014). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Penerbit Rafika Aditama.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. No.7 PP No. 71 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. No. 19 Tahun 2016. *Tentang Pedoman Barang Milik Daerah*.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sanusi. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Doli. D. (2004). *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunanto. (2017). “Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomer 07 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin” *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, Vol. 6 No. 2. <http://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/download/46/44/>.
- Yusuf, M. (2013) *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.